

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENGANGGURAN DI JAWA BARAT PADA PERIODE 2021-2023

Amey Rahayu¹, Anggi Fristania², Dwi Nur Maelisa³, Faturyan⁴, Nina Farlina⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Semarang

Email: ameyrahayu@students.unnes.ac.id¹, anggifristania81@students.unnes.ac.id²,
dwinmaelisa16@students.unnes.ac.id³, faturyan@students.unnes.ac.id⁴,
ninafarlina@mail.unnes.ac.id⁵,

Abstrak

Pengangguran merupakan sebuah kejadian yang di alami di semua negara, termasuk indonesia yang memiliki jumlah penduduk padat, pengangguran juga menjadi permasalahan kompleks yang tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga berdampak luas pada aspek ekonomi, sosial, dan kestabilan politik negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan upah mininum dan jumlah penduduk, terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan analisis literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, berita, dan situs web. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang mencakup informasi terkait pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada periode 2021-2023. Penelitian ini tidak menggunakan observasi lapangan, tetapi mengandalkan pengumpulan data dari berbagai media informasi yang dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan gambaran yang jelas dan relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Barat. serta Tingkat Pendidikan juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Barat. upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Jawa Barat.

Kata Kunci: Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Jumlah Penduduk, Jawa Barat.

Abstract

Unemployment is a phenomenon experienced in all countries, including Indonesia, which has a dense population. Unemployment is also a complex issue that not only increases in quantity but also has widespread impacts on economic, social, and political stability. This study aims to analyze the influence of educational level, minimum wage, and population size on unemployment in West Java Province. This research employs a qualitative descriptive method with a literature analysis approach using various sources such as journals, articles, news, and websites. The data used is secondary data that includes information regarding the impact of educational level, minimum wage, and population size on unemployment in West Java Province during the period of 2021-2023. This study does not utilize field observations but relies on data collection from various information media, which is analyzed in-depth to produce a clear and relevant overview. The results of the study indicate that population size has a negative and significant effect on unemployment in West Java Province. Similarly, the level of education also

has a negative and significant effect on unemployment in West Java Province. In contrast, the minimum wage has a positive and significant effect on unemployment in the province.

Keywords: Unemployment, Educational Level, Minimum Wage, Population Size, West Java.

PENDAHULUAN

Tingkat pengangguran merupakan salah satu isu ekonomi yang menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Secara umum, pengangguran yang tinggi dapat berdampak pada ketimpangan sosial, kemiskinan, serta berkurangnya kualitas hidup masyarakat. Hal ini juga bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, karena adanya penurunan dalam daya beli masyarakat serta berkurangnya produktivitas yang dihasilkan oleh angkatan kerja. Dalam perspektif ekonomi, pengangguran dapat diartikan suatu kondisi dimana individu yang masuk ke dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena mengurangi tingkat produksi dan daya beli masyarakat (Arrista Trimaya, 2014).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan suatu individu atau penduduk yang tidak bekerja, namun sedang mencari suatu pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang krusial di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Tingkat pengangguran yang tinggi memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran menjadi sangat penting dalam upaya penanggulangan masalah ini (Aulia et al., 2024).

Faktor yang menjadi pengaruh dalam

tingkat pengangguran adalah tingkat pendidikan, upah minimum dan jumlah penduduk yang tinggi. Tingkat pendidikan sangat dianggap untuk menentukan kualitas kerja seseorang dan data saing individu di pasar kerja Aulia et al.. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan industri sering kali menjadi kendala dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia. Oleh karena itu, kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran (Guritno & Muljaningsih, 2024).

Selain pendidikan, kebijakan upah minimum juga merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat pengangguran. Upah minimum yang terlalu tinggi dapat meregangkan dunia bisnis, terutama di area bisnis kecil dan menengah, yang dapat memengaruhi pengurangan karyawan (Desy Wulandari & Nenik Woyanti, 2023). Sebaliknya, jika upah terlalu rendah, daya beli karyawan dapat berkurang dan ketidaksetaraan ekonomi dapat terjadi. Oleh karena itu, keseimbangan dalam menentukan upah minimum adalah tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola pekerjaan

Jumlah penduduk memainkan peran penting dalam menentukan tingkat pengangguran di Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yaitu 49,9 juta jiwa, Jawa Barat memiliki banyak peluang kerja. Namun, jika pertumbuhan jumlah penduduk tidak sejalan dengan peningkatan peluang kerja, tingkat pengangguran dapat terus meningkat. Urbanisasi yang pesat dan mobilitas tenaga

kerja yang tinggi juga berkontribusi pada dinamika ketenagakerjaan di provinsi ini. Mengapa Jawa Barat menjadi sorotan dibanding Jawa Tengah? Hal ini karena Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan Jawa Tengah, sehingga tantangan ketenagakerjaan di Jawa Barat cenderung lebih kompleks. Selain itu, konsentrasi industri dan pusat-pusat ekonomi di Jawa Barat, terutama di wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya, menciptakan persaingan tenaga kerja yang sangat tinggi. Faktor-faktor ini membuat Jawa Barat menghadapi tekanan yang lebih signifikan dalam menciptakan keseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan dibanding Jawa Tengah, yang memiliki tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang relatif lebih modera .

Pada teori Keynes yang menyatakan “pengangguran tinggi disebabkan oleh rendahnya permintaan umum yang disebabkan oleh rendahnya permintaan umum yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan dan upah rendah yang menyebabkan rendahnya produksi dan jumlah yang besar dari tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan.” Di samping itu, elemen-elemen seperti kemajuan teknologi, ketidaksetaraan pembangunan antar wilayah, dan ketergantungan pada sektor tertentu juga semakin memperparah keadaan pengangguran di Jawa Barat. Oleh sebab itu, penting sekali untuk mengetahui penyebab dari tingginya tingkat pengangguran serta tantangan yang harus dihadapi dan mencari solusi untuk menangani isu di dalamnya.

Pengangguran tidak hanya menunjukkan kurangnya lapangan pekerjaan, tetapi juga mencerminkan masalah dalam proses Pembangunan ekonomi. Terutama di Jawa Barat, yang memiliki jumlah penduduk terbesar, namun provinsi ini justru memiliki tingkat pengangguran tertinggi kedua di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik

(BPS) di Provinsi Jawa Barat pada akhir tahun 2023 adalah 7,44% tingkat pengangguran. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia mengakibatkan terganggunya banyak sektor, yang dimana mampu meningkatkan tingkat pengangguran di Jawa Barat, dimana pada tahun 2021 tingkat pengangguran di Jawa Barat mencapai 9,82% yang menunjukkan bahwa pengangguran di Jawa Barat saat pandemi cukup tinggi (Maulania Rahma Azzahra et al., 2024).

Judul penelitian “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah minimum, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran di Jawa Barat pada Periode 2021-2023” dipilih karena relevansinya dengan kondisi aktual di Jawa Barat pada periode 2021-2023. Selain itu, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 sangat berpengaruh dalam berbagai aspek ekonomi dan sosial, termasuk sektor ketenagakerjaan di Jawa barat (Maulania Rahma Azzahra et al., 2024).

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat pendidikan, upah minimum, dan jumlah penduduk mempengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara ketiga faktor tersebut dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang dilakukan dalam mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi angka-angka pengangguran.

Solusi yang ditawarkan dalam

penelitian ini termasuk rekomendasi politik yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, upah minimum yang seimbang dan mengelola pertumbuhan populasi. Meningkatkan kualitas pendidikan dapat diimplementasikan melalui peningkatan kurikulum, kualifikasi pelatihan, dan meningkatkan akses ke pendidikan di semua tingkat masyarakat. Keputusan upah minimum yang seimbang harus memperhitungkan situasi ekonomi kawasan dan produktivitas tenaga kerja, sehingga tidak mencakup pengusaha atau karyawan. Mengontrol pertumbuhan populasi dapat dicapai melalui program keluarga berencana dan pendidikan dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah analisis dampak tingkat pendidikan, upah minimum dan populasi pada tingkat pengangguran di Jawa Barat dari tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor mana yang memiliki pengaruh paling penting dan bagaimana mereka memiliki interaksi antara tiga faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya penanggulangan pengangguran di Jawa Barat dan digunakan untuk mempelajari lebih dalam mengenai pengaruh dari tingkat pendidikan, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran, dan menjadikan penelitian ini sebagai landasan yang kuat dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan yang berkelanjutan di masa mendatang (Sagita & Mulyani, 2024)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian langkah ataupun kegiatan yang dilakukan dalam penelitian, yang didasari prinsip-prinsip dasar, perspektif, filosofis, dan paham ideologis, isu-isu dan problematika yang

muncul. artikel dirangkai oleh peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memaparkan secara jelas, rinci, dan relevan proses analisis pengaruh tingkat pengangguran di Jawa Barat. Deskriptif adalah penulisan dengan memberikan penjelasan dan gambaran yang jelas terkait topik yang diambil oleh penulis secara sistematis, penelitian ini mencari hubungan sebab akibat, selain itu juga berfokus pada pengumpulan data pengumpulan data dengan tujuan untuk memahami situasi atau karakteristik yang sedang diteliti, berupaya memberikan gambaran dan pemaparan dari hasil yang diteliti secara sistematis dengan menguraikan pengaruh pengangguran pada tantangan dan solusi perspektif ekonomi tahun 2021-2023. Riset yang digunakan bukanlah riset observasi lapangan tetapi penelitian literatur dari berbagai sumber media informasi seperti jurnal, artikel, website, berita, dan lain- lain. Kualitatif ialah pendekatan yang menekan interpretasi terhadap data non numerik seperti teks dan visual yang kemungkinan besar menggunakan analisis dari berbagai media maupun sumber informasi lainnya melalui perancangan berkelompok setelah itu dimaknakan dengan penjelasan rinci hasil penggalan informasi yang telah dikaji, lalu memilah sesuai dengan materi yang diperlukan dalam penelitian. Objek yang diteliti adalah pengangguran yang ada di wilayah Jawa Barat.

Menurut penulis, fokus penelitian yang menjadi titik perhatian, selain pengaruh pengangguran di Jawa Barat tentunya penulis juga menjelaskan tantangan dan solusi dalam perspektif ekonomi sehingga harapannya dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian metode penelitian pada artikel ini menggabungkan konsep teoritis, deskripsi mendalam dari sumber data dan interpretasi kualitatif untuk menghasilkan implikasi praktis. Dalam penelitian ini, penulis menjadi alat instrumen atau alat penelitian untuk mengumpulkan

data dan informasi menarik serta inovatif pada penelitian. Media Elektronik seperti handphone dan laptop dengan perangkat lunak lainnya sebagai media yang efektif diakui sebagai instrumen tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangguran merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Di Jawa Barat, pengangguran menjadi isu krusial, terutama dengan posisi provinsi ini sebagai daerah dengan populasi terbesar di Indonesia. Tingkat pengangguran di Jawa Barat mencapai 7,44% pada akhir 2023, yang merupakan tingkat pengangguran tertinggi kedua di Indonesia setelah pandemi COVID-19 hal ini menyebabkan lonjakan signifikan pada 2021 dengan angka 9,82%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap pengangguran, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan. berikut merupakan data perbandingan dari tahun 2021 sampai 2023 di Provinsi Jawa Barat (Badan Pusat Statistik, 2024)

Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Barat Pada Bulan Agustus Periode 2021-2023

TAHUN	AGUSTUS
2021	9,82%
2022	8,31%
2023	7,44%

Sumber Data : badan pusat st2021-2023(Badan Pusat Statistik, 2024)

Tabel tersebut menunjukkan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada bulan Agustus dari tahun 2021 hingga 2023. Data diambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan menggambarkan tren penurunan tingkat pengangguran selama tiga tahun terakhir ,Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pengurangan pengangguran di Jawa Barat, baik melalui

kebijakan pemerintah maupun kontribusi masyarakat dalam meningkatkan peluang kerja dalam masalah ini Tingkat pendidikan sangat memengaruhi daya saing individu di pasar kerja. Pendidikan yang berkualitas berperan penting dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan industri. Namun, di Indonesia, termasuk Jawa Barat, masih terjadi mismatch antara keterampilan lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Menurut laporan dari *OECD Education Policy Review* (2021), mismatch ini menjadi kendala besar dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, peningkatan akses pendidikan yang merata masih menjadi tantangan, terutama di wilayah pedesaan. Kebijakan upah minimum juga sering kali menjadi dilema. Menurut penelitian oleh *ILO Global Wage Report* (2022), upah minimum yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perusahaan, terutama UMKM, kesulitan mempertahankan pekerja, sehingga memicu PHK. Sebaliknya, upah minimum yang rendah mengurangi daya beli pekerja dan dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi. Di Jawa Barat, penyesuaian upah minimum di tahun 2021-2023 sering menjadi perdebatan antara pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pelaku usaha, yang memperlihatkan tantangan dalam mencapai keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha. Jawa Barat juga memiliki populasi terbesar di Indonesia dengan mobilitas urbanisasi yang tinggi. Pertumbuhan populasi ini tidak seimbang dengan penciptaan lapangan kerja. Studi dari *World Bank Indonesia Economic Quarterly* (2022) menyebutkan bahwa urbanisasi yang tidak terkendali di wilayah perkotaan seperti Bandung dan Bekasi memperburuk masalah pengangguran struktural. Tantangan ini diperburuk dengan kurangnya distribusi pembangunan infrastruktur dan ekonomi di daerah pedesaan (Badan Pusat Statistik, 2024)

Faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Barat Faktor Ekonomi

a. Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak perusahaan mengalami penurunan permintaan, yang berujung pada pengurangan tenaga kerja (PHK) hingga kebangkrutan. Menurut laporan dari *ILO Indonesia Employment Trends* (2022), sekitar 30% UMKM di Indonesia termasuk di Jawa Barat harus menutup usaha mereka selama masa pandemi. Sektor jasa seperti pariwisata dan ritel menjadi yang paling terdampak, sehingga memperburuk tingkat pengangguran di provinsi ini.

b. Ketidaksesuaian Keterampilan (Skill Mismatch)

Salah satu penyebab utama pengangguran terdidik adalah ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri. Banyak lulusan perguruan tinggi di Jawa Barat yang memiliki kualifikasi, tetapi tidak memiliki keterampilan praktis yang diperlukan di dunia kerja, menyoroti pentingnya reformasi kurikulum pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja (Viennet & Pont, 2017).

c. Otomatisasi dan Digitalisasi

Perkembangan teknologi, terutama dalam era Industri 4.0, menggantikan banyak pekerjaan manual di sektor manufaktur dan jasa. Sektor-sektor ini, yang sebelumnya menyerap banyak tenaga kerja, kini lebih bergantung pada teknologi otomatis. Menurut laporan *McKinsey Global Institute* (2021), otomatisasi diperkirakan akan menggantikan hingga 23% pekerjaan di Indonesia, termasuk di Jawa Barat, dalam 10 tahun mendatang.

Faktor Demografis dan Sosial

a. Angka Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi

Sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, Jawa Barat menghadapi tantangan besar dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif yang terus meningkat. Menurut *Badan Pusat Statistik* populasi Jawa Barat pada tahun 2023 mencapai lebih dari 49 juta jiwa. Tingginya angka pertumbuhan penduduk memperketat persaingan di pasar kerja, terutama bagi penduduk dengan keterampilan rendah.

b. Urbanisasi Yang Tidak Terkelola dengan baik

Urbanisasi yang pesat, terutama ke kota-kota besar seperti Bandung, Bekasi, dan Depok, sering kali tidak disertai dengan perencanaan yang matang. Banyak penduduk yang bermigrasi dari desa ke kota tanpa memiliki keterampilan memadai, sehingga mereka sulit bersaing di pasar kerja formal. *World Bank Urban Development Report* (2022) menyoroti pentingnya pengelolaan urbanisasi yang berfokus pada peningkatan keterampilan penduduk migran.

Faktor Kebijakan dan Regulasi

a. Upah Minimum yang Tinggi

Kenaikan upah minimum regional (UMR) di Jawa Barat sering menjadi dilema antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan bisnis, terutama UMKM. 022 ILO Flagship Report *World Employment and Social Outlook* (2022) mencatat bahwa kenaikan UMR yang signifikan dapat membuat perusahaan lebih selektif dalam merekrut tenaga kerja, bahkan berujung pada pengurangan jumlah pekerja.

b. Kurangnya Program Pelatihan yang Efektif

Banyak program pelatihan kerja yang dirancang pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan industri atau tidak mampu

menjamin penyerapan tenaga kerja. *ILO Skills for Employment* (2021) menyarankan bahwa pelatihan berbasis keterampilan yang disesuaikan dengan permintaan industri lokal adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja.

Tantangan yang Menjadi Pengaruh Pada Pengangguran di Jawa Barat

Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan manusia dan seringkali dianggap sebagai salah satu masalah paling berat. Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, hal itu dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup dan tekanan psikologis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pengangguran menjadi topik hangat dalam perdebatan politik, dengan politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja. Masalah pengangguran ini tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang, tetapi juga oleh negara-negara maju. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat telah meningkat. Kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri adalah satu-satunya masalah yang masih ada. Misalnya, pada Agustus 2023, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki TPT yang lebih tinggi daripada lulusan jenjang lainnya. Selain itu, ada perbedaan dalam distribusi TPT di seluruh kabupaten/kota Jawa Barat. Purwakarta memiliki TPT 10,7%, Karawang 11,83%, dan Bekasi 10%. Dalam upaya mengurangi pengangguran di Jawa Barat masalah penyerapan tenaga kerja dan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri masih menjadi perhatian utama. Ini terlepas dari tren penurunan TPT (Ainul

Ghozali & Seno Aji, 2024). Beberapa tantangan yang terdapat pada pengangguran di Jawa Barat pada rentang tahun 2021-2023 yaitu:

a. Peran Pendidikan Terhadap Pengangguran

Pendidikan adalah faktor penting dalam membangun hasil yg baik sebagai sumber daya manusia yang dipercaya mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi, dapat berpikir kritis dan berperilaku sesuai dengan zaman, Semakin tinggi tamatan lulusan seseorang semakin tinggi juga skill dan peluang untuk bekerja. Oleh sebab itu ada hubungannya dengan pandangan nilai waktu seseorang yang menjadi lebih bervalue, begitu pula peluang untuk mencari pekerjaan menjadi lebih mudah dan nantinya tingkat pengangguran jadi lebih berkurang, namun penting untuk diingat bahwa efektivitas pendidikan dalam mengurangi pengangguran juga bergantung pada kebijakan pemerintah, ketersediaan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Pendidikan berkualitas diimbangi dengan kesempatan yang mudah dan support lingkungan sekitar. Di sisi ada sebuah pernyataan menyebutkan bahwa pendidikan tidak memiliki dampak langsung terhadap pengangguran, hal ini disebabkan karena pendidikan formal sudah tidak cukup mengatasi masalah pengangguran, sementara pendidikan non-formal yang sering terabaikan seperti magang/PKL dan pelatihan keterampilan khusus lain. Keterampilan ini pun bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab angkatan kerja. Dalam hal ini, penyedia lapangan pekerjaan juga harus berperan aktif, misalnya dengan memberi pelatihan, kursus, agar keterampilan pelamar kerja sesuai dengan

kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, angkatan kerja dengan tingkat pendidikan rendah pun masih dapat bersaing di dunia kerja (Budhijana 2020). Pada riset yg diteliti penulis pendidikan di Jawa Barat memiliki kualifikasi cukup tinggi karena memang dasarnya dominan lulusan dari perguruan tinggi, namun keterampilan mereka masih dikatakan kurang karena kurikulum pada pendidikan masih kurang sehingga kurang efektif untuk kebutuhan pasar tenaga kerja (Ainul Ghozali & Seno Aji).

b. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran

Upah minimum memiliki pengaruh positif terhadap pengangguran, ini berarti bahwa semakin tinggi upah minimum, pengangguran cenderung menurun. Sebaliknya, ketika upah minimum turun, jumlah orang yang mencari pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia meningkat. Namun peningkatan upah kerja minimum justru meningkatkan penawaran tenaga kerja, yang pada gilirannya mengurangi permintaan tenaga kerja. akibatnya, terjadi surplus tenaga kerja atau pengangguran (Nainggolan, 2020). Pengangguran akan meningkat karena kenaikan upah minimum menyebabkan peningkatan pengangguran di daerah studi. Salah satu penyebabnya pengangguran ini adalah kekakuan upah (*wage rigidity*) dimana upah tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pasar kerja hingga mencapai titik ekuilibrium, dimana penawaran dan permintaan kerja seimbang atau temu titik tengah. Pengangguran akibat kekakuan upah terjadi ketika penyesuaian antara tenaga kerja keseluruhan dan pekerjaan yang tersedia tidak tercapai. Kenaikan upah setiap tahun di Jawa Barat mendorong banyak perusahaan untuk melakukan efisiensi, salah satunya dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Selain itu tingkat konsumsi masyarakat terus meningkat setiap tahun dan kenaikan harga

barang kebutuhan memaksa pemerintah untuk menaikkan upah minimum. Akibatnya salah satu dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah meningkatnya pengangguran karena perusahaan menghadapi peningkatan biaya produksi dan terpaksa mengurangi jumlah pekerja yang berkontribusi pada tingginya angka pengangguran (Ainul Ghozali & Seno Aji, n.d.).

c. Tingkat Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran

Jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran (Pandiangan et al., 2021). Yang artinya apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan, maka pengangguran akan berkurang. Hal ini bertentangan dengan teori kependudukan Malthus, yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas dan kemiskinan karena tingginya jumlah penduduk akan menurunkan upah dan meningkatkan pengangguran. Namun dalam penelitian ini penulis menyatakan bahwa hasilnya tidak sesuai dengan teori tersebut, kemungkinan karena dampak pandemi COVID-19 yang berlangsung lama, yang membatasi aktivitas masyarakat di rumah dan berkontribusi pada peningkatan angka kelahiran, sehingga jumlah penduduk meningkat. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat membantu mendorong perputaran ekonomi yang memungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan baru. Kegiatan ekonomi yang awalnya dilakukan secara langsung beralih ke platform daring yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi. Nmaun peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun bisa menjadi masalah pengangguran di Jawa Barat untuk angkatan usia produktif. Kondisi ini memungkinkan penduduk di Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan peluang dalam mengurangi

kemiskinan, karena masyarakat memiliki tingkat produktivitas yang cukup unggul. Oleh karena itu jumlah penduduk di kota-kota Jawa Barat dijadikan sebagai faktor pendorong untuk meningkatkan pembangunan dan mendorong kegiatan ekonomi, sehingga kesejahteraan dapat meningkatkan dan kemiskinan dapat berkurang (Ainul Ghozali & Seno Aji, 2024)

Solusi Mengatasi Pengangguran di Jawa Barat

Pengangguran merupakan salah satu tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Jawa Barat, provinsi terpadat di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di wilayah ini masih menjadi perhatian serius. Pada tahun 2023, angka pengangguran di Jawa Barat mencapai 7,44% dari total angkatan kerja, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024). Angka ini melonjak akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi, terutama di pendidikan, upah minimum dan jumlah penduduk. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

a. Reformasi Pendidikan dan Program Wajib Belajar

Kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai seperti sekolah berkualitas dan sarana belajar yang memadai juga dapat mempersulit akses penduduk untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan mereka. Akibatnya, individu mungkin terjebak dalam pekerjaan yang berbayar rendah atau tidak stabil, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang dapat mengarah pada tingkat kemiskinan yang tinggi (Sagita & Mulyani, 2024b).

Pendidikan memainkan peran krusial dalam mengurangi pengangguran struktural, yaitu ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, reformasi pendidikan yang

menyelaraskan kurikulum dengan tuntutan industri sangat diperlukan. Pemerintah dapat memperkuat pendidikan vokasional dan pelatihan keterampilan teknis untuk memastikan lulusan siap kerja. Selain itu, program wajib belajar yang diperluas menjadi 12 tahun dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat. Dengan pendidikan yang lebih baik, tenaga kerja akan lebih kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang (Desy Wulandari & Nenik Woyanti, 2023). Kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri juga penting untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang relevan.

b. Diferensiasi Upah Minimum Berdasarkan Wilayah dan Sektor

Mengingat Jawa Barat memiliki wilayah dengan karakteristik ekonomi yang beragam, pemerintah dapat menetapkan upah minimum yang berbeda untuk setiap wilayah atau sektor sesuai kemampuan ekonomi dan tingkat produktivitasnya Arrista Trimaya. Pemerintah Jawa Barat perlu menetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan biaya hidup (inflasi dan kebutuhan pokok), produktivitas tenaga kerja, serta kondisi ekonomi lokal. Upah tidak boleh terlalu tinggi sehingga membebani perusahaan, terutama UMKM, namun juga tidak terlalu rendah sehingga daya beli pekerja tetap terjaga. Penetapan upah yang seimbang mencegah perusahaan melakukan efisiensi berlebihan dengan mengurangi tenaga kerja, sekaligus memastikan pekerja mendapatkan pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah kenaikan harga barang.

c. Perlu strategi yang holistik melalui program Keluarga Berencana (KB) yang efektif

Pemerintah dapat meningkatkan akses terhadap layanan KB dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih baik serta

memberikan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya pengendalian jumlah anak dalam sebuah keluarga. Selain itu, penyuluhan mengenai manajemen ekonomi keluarga juga harus digencarkan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya perencanaan finansial dalam menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat memahami bahwa keseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan lapangan kerja sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Upaya ini juga perlu didukung oleh kebijakan yang memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan dan akses pendidikan yang merata, sehingga pertumbuhan penduduk tidak menjadi beban ekonomi, melainkan menjadi aset produktif bagi pembangunan Jawa Barat.

Upaya Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam Mengatasi Pengangguran

Pemerintah Jawa Barat sudah mengimplementasikan berbagai upaya untuk mengurangi permasalahan pengangguran, salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan baru. Salah satu langkah yang diambil dengan mengadakan pelatihan bagi para tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja. Langkah ini sejalan dengan langkah pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program-program pelatihan (Muhammad Baihawati & Asnita Frida Sebayang, 2023).

Selain itu pemerintah daerah Jawa Barat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program kartu prakerja. Program ini dibuat untuk memberikan bantuan dan pelatihan intensif bagi pencari kerja, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan dan daya saing di pasar kerja. Program ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ada juga program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mendukung masyarakat Jawa Barat

dan Program BLT BBM yang dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat dari tekanan kenaikan harga global (Maulania Rahma Azzahra et al. 2024).

Pemerintah Jawa Barat juga tidak ketinggalan dalam memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang terdampak oleh berbagai kondisi ekonomi, melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini memberikan bantuan finansial kepada keluarga prasejahtera, sehingga mereka dapat mengurangi beban ekonomi yang mereka alami. Selain itu, ada pula program BLT BBM yang diluncurkan untuk melindungi daya beli masyarakat yang rentan akibat lonjakan harga global, khususnya harga bahan bakar. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah daerah berusaha memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh, agar masyarakat Jawa Barat dapat tetap bertahan di tengah tantangan ekonomi yang semakin (Rep Teguh, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Jawa Barat pada periode 2021-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan tingkat pendidikan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pengangguran, artinya peningkatan dalam kedua faktor tersebut berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran. Sebaliknya, upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum cenderung meningkatkan pengangguran karena dapat membebani perusahaan, terutama sektor UMKM.

Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap pengangguran di Jawa Barat meliputi keterampilan antara lulusan Pendidikan dengan kebutuhan industri, urbanisasi yang tidak terkendali, serta kebijakan upah minimum yang sering

menjadi dilema bagi dunia usaha. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 turut memperburuk kondisi pasar tenaga kerja, terutama di sektor UMKM dan jasa.

Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan reformasi pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, penyesuaian kebijakan upah minimum yang mempertimbangkan keseimbangan antara daya beli pekerja dan keberlangsungan usaha, serta pengelolaan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana dan distribusi pembangunan yang merata. Pemerintah Jawa Barat juga telah melakukan berbagai upaya seperti program kartu prakerja, pelatihan kerja, dan bantuan sosial untuk mengatasi masalah pengangguran. Dengan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan tingkat pengangguran di Jawa Barat dapat terus menurun di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. C. (2024, Desember 4). Menaker: Upah Minimum Sektorial Harus Lebih Tinggi dari Upah Minimum. Diambil kembali dari [antaranews.com: https://m.antaranews.com/berita/4511937/menaker-upah-minimum-sektorial-harus-lebih-tinggi-dari-upah-minimum](https://m.antaranews.com/berita/4511937/menaker-upah-minimum-sektorial-harus-lebih-tinggi-dari-upah-minimum)
- Ainul Ghozali, A., & Seno Aji, T. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Jawa Barat. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent>
- Arrista Trimaya. (2014). PEMBERLAKUAN UPAH MINIMUM DALAM SISTEM PENGUPAHAN NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA. <http://www.hukumonline.com/>
- Aulia, R. E., Malia, S. S., Pujiati, A., & Nihayah, D. M. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 300–309. <https://jipied.org/index.php/JSE>
- Azulaiudin, S. (2021). PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI. *Journal Institusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, 30–31.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen), 2021-2023 [Broadcast].
- barat, b. p. (2023). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat (persen). Diambil kembali dari [jabarprov.com: https://statistik.jabarprov.go.id/dashboard/pengangguran?utm_source=chatgpt.com](https://statistik.jabarprov.go.id/dashboard/pengangguran?utm_source=chatgpt.com)
- Desy Wulandari, & Nenik Woyanti. (2023). Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum, dan Kesempatan Kerja Sektor Formal Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat (2017-2021). *BISCER (Business Economic Entrepreneurship)*.
- Ghozali, A. A. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Jawa Barat. *Independent: Journal of Economics*, 72-84.
- Guritno, S. U., & Muljaningsih, S. (2024). PENGARUH PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM DAN KESEMPATAN KERJA TERHADAP PENGANGGURAN TERDIDIK DI JAWA BARAT. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(1), 113–124. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.1.9>
- Handy, G. V., & Hidayah, N. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk,

- Pendidikan, Tingkat Partisipasi A. Ilmiah Manajemen.
- Maulania Rahma Azzahra, Siti Kumala Zahra, Jilan Rifa Fauziah, Hanivatul Husna, Laudza Hilmy, Dahri Tanjung, & Disya Ayu Rivtryana. (2024). Pengaruh Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Barat: Periode Tahun 2002-2023. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(3), 143–156.
<https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.655>
- Muhammad Baihawafi, & Asnita Frida Sebayang. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran (Rizka Elfina, 2024)Terbuka. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 39–44.
<https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1911>
- Muhammad Hanri, N. K. (2024). Potret Gen z yang Menganggur: Mengungkap Realita di Balik Angka. *Labor Market Brief*.
- Mulyani, R. (2024). Analisis Pengangguran, Kemiskinan, dan Upaya Meningkatkan Potensi Wilayah dalam Perekonomian Kabupaten Barat: Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja. *Multidiciplinary Scientifict Journal*, 812-831. Diambil kembali dari https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=solusi+pengan gguran+di+jawa+barat+2023&btnG=#d=gs_qabs&t=1740452596040&u=%23p%3DUuGJ2OWLUDIJ
- Nilna Muna, S. N. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja di Pulau Jawa. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1-15.
[doi:https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.330](https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.330)
- Nurhidayat, D. (2023, Maret 6). Pengamat: Kualifikasi Sarjana dan Lulusan SMK Tidak Sesuai dengan Kebutuhan Industri. Diambil kembali dari mediaindonesia.com:
https://mediaindonesia.com/humaniora/563152/pengamat-kualifikasi-sarjana-dan-lulusan-smk-tidak-sesuai-dengan-kebutuhan-industri?utm_source=chatgpt.com
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2023). *Transforming Education in Indonesiaa; Examining the Landscape of curent reforms*. OECD Education Policy Perspective.
- Outlook, I.-W. E. (2022). *Word Employment Social Outlook trends 2022*. International Labour Office Geneva.
- R. A., I. S., Khamini, N. M., & Rudiana. (2025). Implementasi Program Keluarga Berencana: Menciptakan Generasi Yang Sehat dan Berkualitas di Kota Bandung. *Review Pendidikan dan Pengajaran*, 544-549. Diambil kembali dari <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Rep Teguh. (2022). BANTUAN SOSIAL BLT BBM untuk 2,7 Juta Keluarga Miskin di Jawa Barat Disalurkan. *Jabarprov*.
<https://jabarprov.go.id/berita/bantuan-sosial-blt-bbm-untuk-2-7juta-keluarga-miskin-di-jawa-barat-disalurkan-6811>
- Rizka Elfina, S. S. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018-2023. *Simki Economic*, 300-309. Diambil kembali dari <https://jipied.org/index.php/JSE>
- Ryder Guy. (2022). *Trends 2022 ILO Flagship Report World Employment and Social Outlook*.
- Sagita, S., & Mulyani, R. (2024a). Analisis Pengangguran, Kemiskinan, dan Upaya Meningkatkan Potensi Wilayah dalam Perekonomian Kabupaten Bandung Barat: Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja.

-
- Multidiciplinary Scientifict Journal, 1(9).
- Sagita, S., & Mulyani, R. (2024b). Analisis Pengangguran, Kemiskinan, dan Upaya Meningkatkan Potensi Wilayah dalam Perekonomian Kabupaten Bandung Barat: Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja. Multidiciplinary Scientifict Journal, 1(9).
- Sagita, S., & R. M. (2024). Pengangguran, Kemiskinan, dan Upaya Meningkatkan Potensi Wilayah dalam Perekonomian Kabupaten Bandung Barat : Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja. Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal, 14.
- Shinta Ulan Guritno, S. M. (2024). Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Barat 2018-2021. of development economic and social studies, 113-124. Diambil kembali dari <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2024.03.1.9>
- Shlvia Windary, S. I. (2021). Kebijakan Pemulihan Ekonoi Dampak Pandemi Covid-19 di Jawa Barat: Respon dan Strategi Pemulihan. CR Journal, 99-118.
- Silva Nur'Aini, L. N. (2023). Transformasi Era Digital: Peluang Menggali Pekerjaan dan Tantangan Terhadap Meningkatnya Pengangguran. Journal Of Economis and Business, 67-73`. Diambil kembali dari <http://jurnal.dokicti.org/index.php/EC> ONIS/index
- Viennet, R., & Pont, B. (2017). Education policy implementation (OECD Education Working Papers, Vol. 162). <https://doi.org/10.1787/fc467a64-en>
- Windi Satariah, R. Y. (2021). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Kota Bandung. Jurnal EKBIS.
- Yudho Ar Rihan, M. P. (2024). Penyebab Tingginya Angka Pengangguran di Jawa Barat. Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 158-165. Diambil kembali dari <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1274>